

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Mardiasmo (dalam Sabri et al., 2020) istilah sektor publik mempunyai banyak makna yang bervariasi, tergantung pada perspektif ilmu yang digunakan. Dalam bidang ekonomi, sektor publik umumnya mencakup berbagai lembaga atau badan yang dikelola oleh pemerintah dengan tujuan menyediakan barang dan jasa pelayanan publik. Fokus utama sektor publik dari sudut pandang ekonomi adalah pada penyediaan layanan yang penting bagi masyarakat yang tidak bisa disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Sektor publik juga diharapkan dapat menjalankan aktivitas operasionalnya dengan terbuka sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan sumber daya dan memastikan bahwa layanan diberikan sesuai dengan tujuannya. Mardiasmo memaparkan, akuntansi sektor publik berperan dalam tiga aspek utama, yaitu menyediakan informasi, pengelolaan manajemen dan akuntabilitas. Ketiga aspek ini merupakan hal penting bagi pemerintahan dalam memberikan informasi kepada publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk untuk membuat keputusan strategis jangka panjang, membantu dalam merancang program yang efektif, untuk menyusun anggaran yang realistik, untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan operasional, serta melaporkan hasil kinerja kepada publik dan lembaga pengawas. (Mardiasmo, 2021)

Pembangunan di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda – beda, tergantung pada potensi, kebutuhan dan kondisi lokal yang unik di setiap wilayah. Hal ini diakui dalam kerangka hukum Indonesia, terutama melalui Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah mereka berdasarkan asas otonomi dan prinsip otonomi seluas – luasnya. Hal ini memungkinkan daerah untuk mengambil inisiatif dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur serta pengembangan program sesuai dengan prioritas lokal. Dengan begitu pemerintah daerah diharapkan mampu lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengembangkan potensi daerah secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah berupaya memberikan kemajuan di bidang pembangunan daerah melalui cara pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), sebagai lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.27 Tahun 1980 yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui perencanaan yang berbasis riset dan inovasi. BAPPERIDA bertanggung jawab untuk membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan program yang bertujuan untuk mendorong kemajuan daerah. Pembangunan daerah yang direncanakan oleh BAPPERIDA selalu terkait erat dengan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah berhak mengelola keuangan secara mandiri, yang mencakup perencanaan anggaran, pengalokasian dana, dan pelaporan penggunaan anggaran. Pengelolaan

keuangan yang baik sangat penting untuk mendukung keberhasilan program pembangunan yang dirancang oleh BAPPERIDA dan memastikan bahwa tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal. (Peraturan Pemerintah no 58 thn, 2005).

Anggaran merupakan alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian organisasi, termasuk di dalam pemerintahan (Nafarin, 2007). Anggaran dalam sektor publik adalah dokumen penting yang menggambarkan rencana keuangan suatu instansi pemerintah untuk periode tertentu. Dalam dokumen ini, semua kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran diuraikan dalam bentuk satuan uang. Anggaran menjadi panduan operasional serta manajemen keuangan bagi organisasi, sekaligus alat pengawas dan evaluasi terhadap kinerja keuangan instansi yang bersangkutan. Realisasi anggaran perlu dikaji ulang guna menjamin realisasi anggaran telah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi anggaran merupakan metode utama untuk menilai keefektifan dan efisiensi operasi di pemerintahan. Dalam konteks ini, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) menjadi alat yang sangat penting. DPA-PD mencakup rincian anggaran yang direncanakan, sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan audit dan evaluasi keuangan, untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik.

Menurut Anthony dan Govindrajan, anggaran disusun dengan memperhatikan tujuan – tujuan utama yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi, untuk mengkoordinasikan berbagai departemen atau unit dalam

organisasi, untuk menentukan jumlah dana yang dapat digunakan, serta untuk mendorong kerjasama di antara berbagai organisasi. (Arwani, 2016). Tujuan – tujuan ini membantu memastikan bahwa anggaran berfungsi sebagai alat pengelolaan yang efektif untuk mencapai kinerja optimal dalam organisasi. Menurut Nur Achmad Affandi, anggaran yang disusun harus berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, disiplin anggaran, keadilan, efisien dan efektif. Anggaran yang disusun perlu dilakukan analisis guna memastikan bahwa anggaran telah sejalan dengan realisasinya, jika tidak sejalan maka anggaran perlu dilakukan analisis dan revisi. Dengan analisis maka pemerintahan bisa melakukan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran.

Analisis berkaitan dengan selisih. Analisis selisih merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan anggaran yang terjadi di perusahaan. Data perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran jika diperbandingkan menimbulkan perbedaan atau disebut dengan selisih. Analisis ini sangat penting karena membantu manajemen dalam memahami penyebab perbedaan tersebut. Komponen utama dalam analisis selisih adalah selisih pendapatan dan selisih biaya.

Dengan demikian, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Pekalongan merupakan satuan kerja pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, diakui adanya hambatan yang mengganggu efektivitas dan efisiensi sistem penganggaran. Selain itu, pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat guna menghindari

ketimpangan dan memastikan pembangunan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan bersama. Penyusunan anggaran di BAPPERIDA Kabupaten Pekalongan memiliki banyak kelemahan yang menyebabkan perbedaan antara angka realisasi dengan anggaran. Sub Bagian Keuangan BAPPERIDA Kabupaten Pekalongan mengakui bahwa seringnya revisi anggaran menunjukkan bahwa perencanaan awal anggaran belum sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum mampu memproyeksikan anggaran secara akurat, sehingga anggaran tersebut tidak cukup tangguh dalam menghadapi perubahan yang terjadi sepanjang tahun pembangunan.

Berdasarkan tabel di bawah ini bisa dilihat perbandingannya :

Tabel 1. 1 Perbandingan Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja BAPPERIDA Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 & 2023

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja pada DPA	Anggaran Belanja pada CALK	Realisasi Anggaran Belanja pada CALK
2022	Rp. 9.830.197.800	Rp. 9.830.197.800	Rp. 8.987.746.834
2023	Rp.10.425.080.000	Rp. 10.425.080.000	Rp.10.002.492.083

Tabel 1. 2 Tingkat Rasio Capaian

Tahun Anggaran	Sisa Anggaran Belanja	Rasio
2022	Rp. 842.450.966,00	91,43 %
2023	Rp. 422.587.917,00	95,95 %

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran & CALK BAPPERIDA Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 & 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat total anggaran belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran di BAPPERIDA Kabupaten Pekalongan untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp.9.830.197.800 dengan nominal yang sama dengan anggaran pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.9.830.197.800 sedangkan untuk realisasi anggaran nya sebesar Rp.8.987.746.834 dan sisa anggaran 2022 sebesar Rp.842.450.966,00, sehingga persentase realisasinya yaitu 91,43 %. Sedangkan untuk jumlah anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran di BAPPERIDA Kabupaten Pekalongan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp.10.425.080.000 dengan nominal yang sama dengan anggaran pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.10.425.080.000,00 sedangkan untuk realisasi anggaran nya sebesar Rp.10.002.492.083,00 dan sisa anggaran 2023 sebesar Rp.422.587.917,00 sehingga persentase anggarannya 95,95%.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan, penyusunan dan pelaksanaan dapat dipastikan melalui anggaran. Sehingga penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Pekalongan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka permasalahan yang muncul dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penyusunan anggaran perangkat daerah (DPA-PD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Pekalongan ?
2. Apakah pelaksanaan anggaran perangkat daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Pekalongan sudah efektif?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berikut merupakan tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini :

1. Untuk mengetahui proses penyusunan anggaran perangkat daerah (DPA-PD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan anggaran perangkat daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Pekalongan sudah efektif.

1.4 Kegunaan Tugas Akhir

Tugas Akhir mempunyai manfaat yang sangat banyak untuk penulis, instansi dan pembaca. Berikut ini merupakan manfaat dari Tugas Akhir ini :

1. Bagi Penulis

Penulis berharap melalui penelitian ini dapat menambah pemahaman penulis mengenai penyusunan dan pelaksanaan anggaran di BAPPERIDA Kabupaten Pekalongan.

2. Bagi Instansi BAPPERIDA Kabupaten Pekalongan

Hasil dari penelitian ini sebagai masukan untuk pengelolaan anggaran perangkat daerah di BAPPERIDA Kabupaten Pekalongan untuk kedepannya.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa dan orang lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

1.5 Metode Tugas Akhir

1. Sasaran Tugas Akhir

Pendalaman ini memfokuskan pada Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan.

2. Lokasi Tugas Akhir

Penelitian ini dilakukan di Kantor BAPPERIDA Kabupaten Pekalongan yang beralamat di Jalan Krakatau No.9, Tambor, Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

3. Jenis Tugas Akhir

a. Jenis Penelitian

Penelitian dalam yang digunakan pada tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), karena tepat untuk penelitian ini. Data yang didapat dalam penelitian kali ini dengan cara mengumpulkan dan mencatat

informasi data yang didapat dilapangan secara langsung. Data tersebut diperoleh dari pihak yang bersangkutan mengenai penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada BAPPERIDA Kabupaten Pekalongan melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian Tugas Akhir ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif yaitu berupa data lisan atau menggunakan kata – kata tertulis dari narasumber. Serta menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan dengan penelitian Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran dengan wawancara.

4. Penentuan Variabel Tugas Akhir

Penelitian ini menggunakan variabel Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan keterangan data yang jelas dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti, maka diperlukan cara dalam mengumpulkan suatu data, yaitu :

1) Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan informasi dari bermacam sumber dan pustaka serta sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

2) Studi Lapangan

a. Wawancara

Wawancara atau tanya jawab secara langsung mengenai proses penyusunan anggaran dan penggunaan anggaran pada BAPPERIDA Kabupaten Pekalongan. Wawancara dilakukan langsung dengan Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan BAPPERIDA Kabupaten Pekalongan. Serta meminta informasi berupa data yang berkaitan dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti, dan menganalisis dokumen – dokumen yang relevan dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada BAPPERIDA Kabupaten Pekalongan. Studi dokumentasi ini penting untuk memahami bagaimana anggaran disusun, dijalankan, dan diimplementasikan dalam perangkat daerah, serta untuk mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasinya.

6. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang biasanya didapatkan terbagi menjadi dua, yaitu :

a) Data Primer

Data Primer memiliki pengertian yaitu data yang didapat langsung melalui sumber pertama, baik dengan mengamati secara langsung maupun melalui kegiatan wawancara kepada pihak yang yang menyusun dan melaksanakan anggaran pada BAPPERIDA Kabupaten Pekalongan.

b) Data Sekunder

Data Sekunder memiliki pengertian yaitu data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda. Data sekunder diperoleh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.6 Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini ditulis menggunakan sistematika yang terdiri dari lima bab utama yang masing – masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika Penulisan tugas akhir ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memberikan kerangka dasar bagi penelitian yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam bab – bab berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan penjelasan secara ringkas mengenai metode maupun teori yang dikemukakan oleh para ahli yang digunakan untuk pemecahan masalah yang berkaitan pada penelitian ini.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi mengenai pengenalan tempat yang dijadikan sebagai objek dari penelitian meliputi sejarah dan perkembangan perusahaan, filosofi, struktur organisasi, dan aktivitas perusahaan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data – data yang diperlukan yang telah diperoleh peneliti dari objek penelitian dan mengulas atau membahas mengenai data – data yang telah diperoleh dari objek penelitian serta bab ini menyajikan hasil yang telah dianalisa oleh peneliti terhadap data yang diperoleh.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari bab sebelumnya, yang mana data tersebut sudah dianalisa oleh peneliti dan pada bab ini berisi saran yang dikemukakan oleh peneliti yang sekiranya bisa untuk bahan pertimbangan bagi kantor instansi.